



**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA MALANG
TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

FENTI SELLA ULAN YANUAR ELFIYAH
NPM 21801091156



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2024**

RINGKASAN

Fenti Sella Ullan Yanuar Elfiyah, NPM 21801091156, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2024. **Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kota Malang Tahun 2019 – 2021**. Dosen Pembimbing I Prof. H. Drs. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II Hirshi Anadza, S.Hub.Int

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah secara konsisten, tingkat bantuan pemerintah terhadap negara-negara tersebut masih jauh di bawah istilah berkembang. Menjawab keputusan tersebut, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama PKH dengan membenahi pelaksanaannya di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kota Malang., PKH dianggap sebagai program pengentasan kemiskinan andalan namun dalam kenyataannya pelaksanaan PKH masih memiliki beberapa kekurangan sehingga perlu di evaluasi secara berkala.

Penelitian ini dipusatkan pada penggunaan teori evaluasi dari William N. Dunn (2003:608) yang menggunakan enam aspek yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi PKH dalam pelaksanaannya di Kota Malang Tahun 2019 – 2021. Pemeriksaan ini menggunakan eksplorasi subyektif yang berbeda-beda, dimana pengumpulan informasi dibawakan melalui tiga tahapan yaitu observasi, interview dan dokumentasi yang kemudian akan diselidiki menggunakan analisis data Miles dan Huberman (1984).

Hasil penelitian Evaluasi PKH di Kota Malang tahun 2019 – 2021 menunjukkan bahwa efektivitas penyampaian pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang disampaikan melalui pertemuan kelompok P2K2 telah menghasilkan *output* yang cukup baik dan sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, sedangkan efisiensi usaha pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah telaksana dengan baik sehingga menciptakan pendamping PKH yang berperan krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah, responsivitas yang ditampakkan oleh pihak yang terlibat seperti Pendamping PKH dan KPM PKH juga sangat baik. Namun, ada beberapa hambatan yang ditemui seperti besaran bantuan yang diterima KPM tidak dapat mencukupi kebutuhan bahkan masih di temukan ketidak konsistenan besaran bantuan yang di terima KPM, pemerataan manfaat PKH di Kota Malang Tahun 2019-2021 belum efektif menjangkau seluruh, KPM PKH acap kali menggunakan atau memanfaatkan dana bantuan secara tidak tepat yakni menggunakannya untuk arisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PKH di Kota Malang tahun 2019 – 2021 belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan

SUMMARY

Fenti Sella Ullan Yanuar Elfiyah, NPM 21801091156, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2024. Evaluation of the Program Keluarga Harapan in Malang City 2019 – 2021. Supervisor I Prof. H. Drs. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Supervisor II Hirshi Anadza, S.Hub.Int

Poverty is one of the problems often experienced by developing countries, including Indonesia, with a population that continues to increase every year, causing the level of welfare of its people to still be far below the term prosperity. Responding to this urgency, in 2007 the government initiated a Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) program known as PKH by tightening its implementation in all regions in Indonesia, including Malang City. PKH is considered a mainstay poverty alleviation program, but in reality the implementation of PKH still has several shortcomings so that needs to be evaluated periodically.

This research was studied using evaluation theory from William N. Dunn (2003:608) which uses six review indicators such as effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. The aim of this research is to find out how the PKH Evaluation is implemented in Malang City in 2019 - 2021. This research uses descriptive qualitative research, where data collection is carried out through three stages of activities, namely observation, interviews and documentation which will then be analyzed using techniques. Miles and Huberman (1984) data analysis.

The results of the PKH Evaluation research in Malang City in 2019 - 2021 show that the effectiveness of the delivery of health, education and social welfare services delivered through P2K2 group meetings has produced quite good output and is in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2009, while business efficiency The selection of Human Resources (HR) has been carried out well thereby creating PKH Facilitators who play a crucial role as an extension of the government. The responsiveness shown by the parties involved such as PKH Facilitators and PKH KPMs is also very good. However, there are several obstacles that are encountered, such as the amount of assistance received by KPMs cannot meet their needs and there are even inconsistencies in the amount of assistance received by KPMs, the distribution of PKH benefits in Malang City in 2019-2021 has not been effective in reaching all, KPM PKHs often use or using aid funds inappropriately, namely using them for social gatherings. So it can be concluded that PKH in Malang City in 2019 – 2021 has not gone well.

Keywords: *Evaluation, Program Keluarga Harapan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan dimana permasalahan-permasalahan penting tidak dapat diselesaikan sehingga sulit untuk siap memenuhi kebutuhan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kurangnya kompensasi menurunkan kualitas hidup seseorang. Pasalnya, masyarakat miskin membutuhkan lebih banyak uang untuk mengakses berbagai layanan yang menunjang gaya hidup mereka. Rendahnya tingkat pembangunan manusia di Indonesia disebabkan oleh kemiskinan, karena membatasi hak masyarakat atas pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak dan jaminan kesehatan.

Di Indonesia, kemiskinan masih terjadi karena banyaknya orang yang mereka yang tidak produktif dalam bekerja termasuk dalam kategori pengangguran terselubung. Model pengangguran seperti ini sebenarnya sudah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia, sehingga meskipun banyak keluarga di Indonesia yang berstatus dan bekerja, namun sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Soetomo, 2006: 285). Karena kemiskinan telah menjadi masalah cukup lama dan terus terjadi di masyarakat umum saat ini. Meskipun demikian, dampak sampingnya kini semakin meluas seiring dengan kondisi darurat berlapis yang masih dihadapi oleh negara Indonesia. Kebutuhan data di Indonesia pada tahun 2020 adalah 26,42 juta

orang. Angka ini meningkat sebesar 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta (BPS, 2020). Hal ini juga mengingat Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, masyarakat masih menerima lebih sedikit bantuan dari pemerintah dibandingkan bantuan dari negara maju.

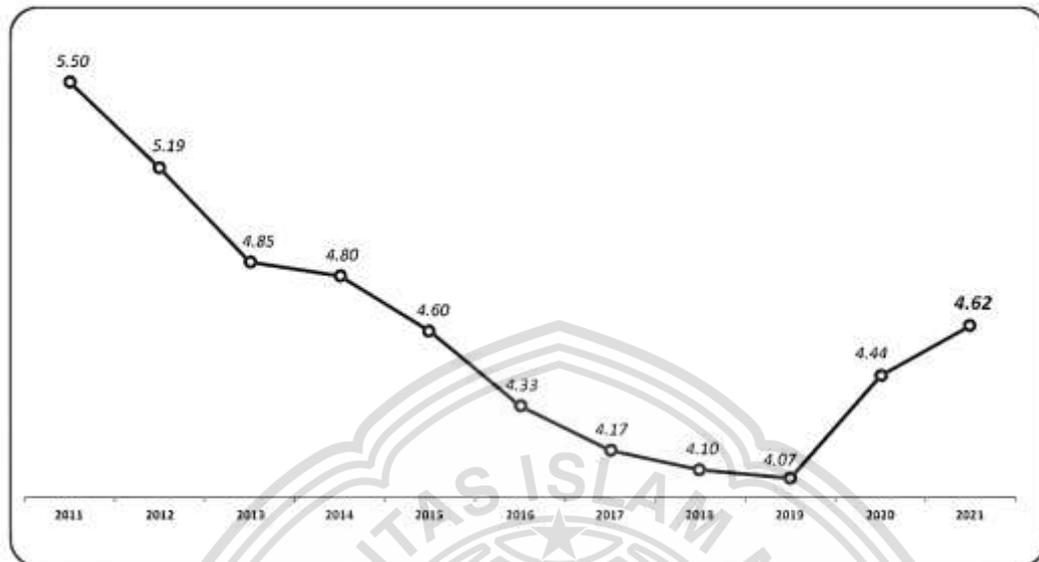
Kesadaran akan keberadaan masyarakat Indonesia yang masih rendahnya kepuasan pribadi terhadap bantuan pemerintah dan rendahnya kualitas SDM terlihat dari rendahnya derajat pendidikan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, penting untuk menyatukan visi publik, mengkoordinasikan kemajuan-kemajuan dan bidang-bidang kekuatan untuk mencapai tujuan pembangunan SDM berkualitas yang merupakan kewajiban bersama, baik oleh otoritas publik, parlemen dan masyarakat (Sukarno, 2009: 14). Dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, otoritas publik memainkan peran penting dalam hal ini, misalnya melalui PKH, sebuah upaya yang didukung oleh wajib pajak untuk menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan PKH. Program ini merupakan bantuan keuangan kontingen yang dihubungkan dengan kebutuhan pendidikan dan bantuan pemerintah (Tim Nasional PPK, 2012:19).

PKH diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dijalankan oleh Dinas Sosial, salah satu lembaga pelayanan sosial milik pemerintah, dan dikelola oleh Kementerian Sosial. PKH pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2007 dan dipandang sebagai pilar

program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program “*Family Trust*” dilaksanakan sesuai Peraturan No. 40 Tahun 2004 tentang Kerangka Pensiun yang Dikelola Pemerintah, Pengumuman Resmi No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pemajuan Wajar dan Pengumuman Resmi No. 15 tentang Kecepatan Peningkatan Keringanan Kemiskinan. PKH ini diberikan dengan persyaratan khusus dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan otonomi penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Bantuan (KPM) (Kemensos, 2021).

Implementasi PKH di Kota Malang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Tentu saja, konspirasi reaksi diberikan dengan memberikan izin masuk sederhana kepada individu yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan penting di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Cara masuk yang mudah ini salah satunya didapat dari dukungan bantuan yang diperoleh masing-masing anggota PKH. Penyelenggaraan PKH di Kota Malang bergantung pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Pemerintah Daerah Malang dalam hal ini Bansos Kota Malang merupakan ketua program di Tingkat Kota. Pelaku PKH dan Pendamping PKH Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan kontrak. Sebenarnya eksekusi di lapangan ditopang oleh SDM.

Gambar 1.1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang, 2011 – 2021



Sumber: Survei Susenas 2011 – 2021, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Perkembangan tingkat Kemiskinan di Kota Malang mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan terus menunjukkan kinerja yang baik. Angka kemiskinan di Kota Malang mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dalam setahun terakhir, hingga mencapai angka 4,07 persen pada tahun 2019. Berbeda dengan periode sebelumnya, penurunan pada tahun 2019 justru menurun karena pada tahun 2018 angka kemiskinan berkurang sebesar 0,07 persen. Dalam jangka panjang, penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Malang saat ini berada pada tahap yang landai. Namun hal ini memerlukan kajian lebih lanjut dari atas hingga bawah karena konsep kemiskinan bersifat tunggal, terutama pada kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, baik masyarakat yang hampir sampai pada garis kemiskinan

maupun masyarakat yang berada di garis kemiskinan. agak di atas garis kemiskinan (BPS, 2020).

Saat ini jumlah penduduk Kota Malang yang masuk dalam miskin semakin bertambah. Pada tahun 2019 angkanya mencapai 4,07 persen dari seluruh populasi. Namun, berdasarkan informasi pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 4,44 persen. Pada Walk 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Malang mencapai 4,62 persen (40,62 ribu jiwa), meningkat 1,85 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Walk 2020 sebesar 4,44 persen (38,77 ribu jiwa). Tingkat masyarakat miskin pada Walk 2021 berkisar 4,62 persen, meningkat sebesar 0,18 persen dibandingkan dengan Walk 2020 yang sebesar 4,44 persen (BPS, 2022). Selain itu, terdapat 9.381 keluarga penerima KPM PKH di Kota Malang. Nomor tersebut merupakan informasi warga kurang mampu di Kota Malang yang mendapat bantuan PKH. Wajar jika tidak semua warga Kota Malang menerima bantuan PKH, namun pemerintah pusat telah menetapkan kriteria calon KPM PKH (Rahma, 2021).

Melihat uraian yang terpapar diatas,peneliti terpacu untuk mengetahui “Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kota Malang tahun 2019-2021. Adapun alasan peneliti tertarik untuk meneliti ialah :

1. Karena PKH merupakan program bantuan yang lebih banyak di ketahui oleh masyarakat dari pada bantuan lain.
2. Karena fokus pengimplementasian PKH memuat 3 (tiga) bidang yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sedangkan bantuan

lain misalnya BLT (Bantuan Langsung Tunai) pelaksanaannya hanya di distribusikan saja tanpa diberikan arahan dan bimbingan tentang penggunaan dana bantuan BLT.

3. Pelaksanaan PKH cukup konsisten pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran landasan di atas, maka permasalahan dalam pemeriksaan ini adalah, bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan di Kota Malang 2019-2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Mengingat definisi permasalahan di atas, maka maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui evaluasi PKH dalam pelaksanaannya di Kota Malang Tahun 2019 - 2021.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu sudut pandang penting dalam membuat proposisi adalah mengenai manfaatnya. Eksplorasi ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara lugas dan tidak langsung. Keunggulan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Pemeriksaan ini bertujuan untuk membangun informasi dan data di bidang aspek keuangan serta memberikan tambahan informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat yang memerlukannya.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan terkait PKH atau program mitigasi kemiskinan dalam membantu menghilangkan kemelaratan di kancah publik.

2) Bagi Pendamping PKH

Sebagai sumber perspektif untuk meningkatkan atau meningkatkan bantuan kepada penerima manfaat PKH.

3) Bagi Masyarakat

sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana PKH dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Evaluasi PKH seiring berhubungan dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Malang sehingga menjadi subjek penelitian ini. Oleh karena itu, susunan penulisan dalam eksplorasi ini terdiri dari 5 bagian secara khusus :

BAB 1 PENDAHULUAN

Sesuai dengan judulnya, bab pertama skripsi merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penyusunannya. Penulis mengumpulkan ikhtisar dari masing-masing bagian dari satu bagian ke bagian lainnya yang dipisahkan menjadi lima bagian, yaitu latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua merupakan survei tertulis yang mengkaji akibat-akibat dari pemeriksaan yang lalu, memuat kajian literatur yang melandasi penyusunan penelitian ini, dan pada bagian ini juga akan dipahami sistem kerangka pemikirannya.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bagian ketiga merupakan teknik pemeriksaan yang memuat macam-macam eksplorasi, pusat penelitian, strategi pengumpulan informasi, jenis dan sumber informasi. Bagian ini juga akan menggambarkan prosedur pengumpulan informasi dan metode pemeriksaan informasi.

BAB 4 GAMBARAN LOKASI PENELITIAN & ANALISIS DATA

Bagian keempat menjelaskan keadaan geologis area eksplorasi, penyelidikan informasi, dan percakapan yang berisi tampilan dan pemeriksaan informasi. Bagian ini juga menjelaskan dampak investigasi melalui pembahasan.

BAB 5 PENUP

Bagian kelima merupakan keputusan yang memberikan gambaran akhir hasil pemeriksaan yang diambil dari bagian penyelidikan informasi dan percakapan eksplorasi. Selain itu, saran penelitian juga diungkapkan dan ide-ide yang dapat berguna untuk pertemuan lain di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap PKH di Kota Malang Tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan PKH belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal, dengan tujuan PKH yang diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dan membuka akses melalui stimulan pemberdayaan melalui P2K2 untuk keluarga miskin dalam meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan maupun kesejahteraan sosial yang belum sepenuhnya tercapai.

Ketidaktercapaian PKH untuk mengentaskan kemiskinan ini diukur menggunakan enam indikator dari teori William N Dunn (2003) yang mana tiga indikator yang telah tercapai dengan baik yakni efektivitas, efisiensi dan responsivitas sedangkan indikator yang belum tercapai ialah kecukupan, perataan, dan ketepatan. Berikut uraian singkat mengenai capaian indikator yang dimaksud ialah:

Pertama, Efektivitas penyampaian pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang disampaikan melalui pertemuan kelompok P2K2 telah menghasilkan *output* yang cukup baik dan sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Para pendamping PKH dengan rapih mempersiapkan materi P2K2

melalui berbagai materi yang tertera pada model yang disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia

Selain membentuk pemahaman melalui penyampaian materi pada pertemuan kelompok P2K2 para pendamping PKH juga memonitoring komponen PKH dalam bidang pendidikan dan kesehatan melalui pemantauan konsistensi kehadiran penerima PKH dengan menjalankan kewajibannya masing – masing disetiap bidangnya. Sehingga para KPM mampu mencerna dan memahami penyampaian materi maupun hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat PKH dengan terus konsisten mengikuti kegiatan P2K2.

Kedua, Efisiensi usaha pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah terlaksana dengan baik sehingga menciptakan pendamping PKH yang berperan krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui PKH dengan melaksanakan pemilihan pendamping secara selektif. Pemilihan atau seleksi pendamping PKH dilaksanakan dan dipilih langsung oleh Kementerian Sosial melalui Direktur Jaminan Sosial dengan 3 tahap seleksi, melalui mekanisme pelaksanaan PKH.

Dengan penentuan dan pemilihan pendamping PKH secara selektif dan diselenggarakan langsung oleh pusat (Kementerian Sosial) pemerintah telah menampakkan komitmennya untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk di terjunkan langsung untuk mendampingi para KPM dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui PKH. Melalui banyaknya usaha yang dilakukan para agen pelaksana dalam menjalankan PKH di Kota Malang Tahun

2019-2021 maka indikator efisiensi pemilihan SDM PKH telah terpenuhi dengan baik.

Ketiga, Kecukupan besaran bantuan yang diterima oleh KPM dinilai belum efektif dan tidak dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin di Kota Malang, bahkan ditemukan adanya ketidak konsistensinan penerimaan bantuan PKH pada KPM dengan komponen Anak SMA yang seharusnya mendapatkan besaran dana sebesar Rp. 500.000 menjadi Rp. 700.000, Rp. 375.000 sampai dengan Rp.400.000.

Penerimaan besaran bantuan yang tidak konsisten memerlukan pengkajian ulang yang seharusnya dilakukan oleh pendamping PKH jika terjadi ketimpangan pada penyaluran bantuan PKH, hal ini untuk menekankan unsur keadilan penerimaan besaran bantuan sesuai dengan kriteria komponen yang ada.

Keempat, Perataan manfaat PKH di Kota Malang Tahun 2019-2021 belum efektif menjangkau seluruh lapisan penduduk miskin atau keluarga miskin di Kota Malang dilihat dari penelaahan indeks jumlah kelurga miskin di Kota Malang pada tahun 2019 – 2021 selalu mengalami peningkatan secara pesat, namun tidak diiringi dengan ketercapihan cakupan atau jangkauan dana bantuan PKH yang di terimanya.

Hal ini disebabkan oleh karakteristik bantuan yang memang merupakan bantuan bersyarat, yang mana penerima bantuan harus memiliki persyaratan yang ada dalam setiap komponen, kemudian hal lain yang menyebabkan ini

terjadi ialah penjangkauan pengentasan masyarakat miskin tidak dapat mengandalkan satu bantuan saja. Perlu diingat PKH merupakan salah satu bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan ini bersifat kompleks dan memang sulit untuk dientaskan PKH tidak dapat menjangkau 50% dari masyarakat sasaran yang ada.

Kelima, Responsivitas yang ditampilkan oleh beberapa informan peneliti sebagai kelompok sasaran PKH sudah cukup baik, masyarakat kelompok sasaran merasa terbantu dengan adanya bantuan PKH ini, sedangkan untuk pelaksana PKH (Pendamping PKH) juga menunjukkan responsivitas yang baik hal ini ditunjukkan dengan tindakan pendamping PKH yang responsif dalam merespon ketidak tepatan sasaran PKH yang diadukan oleh kelompok sasaran PKH. Responsif dalam menyelesaikan permasalahan dengan melakukan koordinasii secara berkala dengan pemerintah desa di tingkat RT/RW dan responsif dalam memvalidasi data dengan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG.

Dengan melihat adanya responsivitas yang cukup baik pada kedua aspek pelaksana PKH baik dari kelompok sasaran dan agen pelaksana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Malang Tahun 2019-2021 cukup menumbuhkan sinergitas setiap orang yang didalamnya sehingga menimbulkan reaksi yang cukup aktif dalam menyikapi segala fenomena yang ditemuinya mulai dari pengaduan sampai pada penyelesaian masalahnya.

Keenam, Ketepatan penggunaan dana bantuan PKH di Kota Malang Tahun 2019-2021 sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini di tampilkan dengan penuturan 3 informan peneliti yang memahami pemanfaatan dana bantuan PKH tersebut sesuai dengan porsi komponen masing – masing penerima. Namun tidak dapat dihindarkan bahwa hambatan masih tetap ada yang mana para kelompok sasaran (KPM PKH) acap kali menggunakan atau memanfaatkan dana bantuan secara tidak tepat yakni menggunakannya untuk arisan.

Namun dalam menghadapi ketidak tepatan penggunaan manfaat PKH pendamping PKH Kota Malang selalu menyisipkan sebuah amanat dan anjuran pada setiap pertemuan kelompok P2K2, yang mana hal ini dilakukan untuk selalu mengingatkan kepada kelompok sasaran untuk memanfaatkan dana bantuan PKH dengan tepat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka PKH di Kota Malang Tahun 2019-2021 memerlukan bentuk kontri berupa saran yang digunakan sebagai bentuk masukan, pengevaluasian dan perbaikan dimasa depan. Adapun saran – saran yang dimaksud ialah :

1. Perlunya sosialisasi melek teknologi di Kelurahan wilayah Kota Malang karena ketidakfahaman pemutakhiran data acap kali tidak melakukan pemutakhiran data. Dinas Sosial harus lebih aktif dalam melakukan

sosialisasi pentingnya pembaharuan data DTKS supaya tidak ada lagi ketidaktapatan sasaran PKH pada kelompok sasaran.

2. Perlu adanya transparansi pendistribusian PKH baik melalui pihak Bank, PT. POS maupun Pendamping PKH, transparansi perlu dilakukan agar KPM mengetahui berapa besaran dana bantuan PKH yang akan di terimanya. Mengingat masih terdapat ketidakkonsistenan nominal pendistribusian, pihak Bank, PT. POS maupun Pendamping PKH perlu menerangkan mengapa nominal yang diberikan tidak konsisten dari satu periode pencairan ke periode pencairan berikutnya, walaupun ada kemungkinan bahwa dana bantuan PKH berkurang karena kelompok sasaran diindikasi menerima sanksi karena tidak menghadiri pertemuan wajib, KPM perlu diinfokan secara transparan.
3. Perlu adanya pembaharuan kebijakan komponen penerima bantuan PKH mengingat PKH tidak dapat menjangkau seluruh anggota keluarga yang diindikasi sebagai penduduk miskin, namun hanya mencakup individu yang diprioritaskan sebagai komponen PKH, maka pemerintah perlu melakukan pembaharuan dimana kelompok sasaran PKH ialah keluarga miskin per KK bukan hanya salah satu individu yang dijadikan komponen PKH.
4. Untuk penelitian selanjutnya yang mengambil tema serupa dengan peneliti diharapkan mampu memperkaya data primer dengan melakukan kegiatan wawancara dengan informan yang lebih banyak agar dapat memperkaya data dan menciptakan validitas data yang kuat, untuk

mengkaji penelitian dengan tema yang sama peneliti selanjunya perlu menggunakan metode data kuantitatif agar dapat mengkaji data lebih kompleks.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin: Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Aliamsa. (2021). *Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu [Skripsi]*. Sulawesi Selatan: Repository Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Anggoro. (2008). *Kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*. Yogyakarta: <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/39854>.
- Ardianto, E. (2010). *Metode Penelitian Untuk Publik Relations : Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT. Simbiosis Rekatama.
- Arif, Sukuryadi, & Fatimaturrahmi. (2017). pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan X(1)*, 46-62.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009). *Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial : Program keluarga Harapan 2009 : Deteksi Dini Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesehatan dan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016, Mei 09). *PKH Untuk pengangguran Kemiskinan dan Ketimpangan Menuju Indonesia Sejahtera*. Diambil kembali dari Dampak Positif PKH: <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/pkh-untuk-pengangguran->

- kemiskinan-dan-ketimpangan-menuju-indonesia-sejahtera (diakses pada 10 September 2023)
- Badan Pusat Statistik. (01, Januari 2021). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari Statistik Indonesia 2020: <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html> (diakses pada 09 Januari 2023)
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Jawa Tengah Tahun Dalam Angka Semarang*. Semarang: BPS Jawa Tengah .
- Badan Pusat Statistik. (2020, Februari 18). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari <https://malangkota.bps.go.id/> (diakses pada 14 Januari 2022)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat Tahun 2020*. Bandung: BPS Bandung.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2020-2022*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Malang: <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> (diakses pada 10 November 2023)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2022). *Luas Kecamatan dan Persentase Luas Kecamatan di Kota Malang 2020-2022*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Malang: <https://malangkota.bps.go.id/indicator/153/317/1/luas-kecamatan-dan-persentase-luas-kecamatan-di-kota-malang.html> (diakses pada 10 November 2023)
- Bantul, B. P. (2020, Februari 14). *14 Kriteria Masyarakat Miskin Menurut Satandar BPS*. Diambil kembali dari <https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MISKIN-MENURUT-STANDAR-BPS> (diakses pada 15 Maret 2023)
- Bappenas. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah Ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

- Berita Remsi Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan Kota Malang 2023*. Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- BPS. (2020, Maret 1). *Badan Pusat Statistik*. Dipetik Januari 14, 2022, dari BPS Kota Malang: <https://malangkota.bps.go.id/>
- BPS, 2. (2020, Nopember 30). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari Statistik Indonesia 2020: <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Chazali, H. S. (2016). *Kebijakan Pulik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Jakarta: Social Security Development Istitute.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 4th Edition*. United States of America: Pearson.
- Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. (2018). *Rencana Strategi 2018 - 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang*. Malang: Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
- Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, Inveancevich , & Donnelly, J. H. (2001). *Organisasi Terjemahan Agus Dharma* . Jakarta: Erlangga.

- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kadji, Y. (2013, November 07). *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Diambil kembali dari UNG Ripository: https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/318/Kemiskinan_dan_Konsep_Teoritisnya.pdf)
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UAPP AMP YKPN.
- Kusmawati, E. (2019). *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Prespektif Ekonomi Islam [Skripsi]*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mahanum. (2021). Tinjauan Pustaka. *Journal of Education Vol. 1 No. 2*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3*. United State Of America: SAGE Publications, Inc. .
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muin, Rahmah, & Rosdiana. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penerimaan Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Camplangan Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol. 5 No.2*.
- Nizar, M. (2017). Analisis Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol. 3 No.2*.
- Nugroho, H. (1995). *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Nugroho, S. C. (2021). Efektivitas Implementasi Program Keluarga Haraoan (PKH) di Kampung Telur Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8 Edisi II*, 1-12.
- Nurhidayati, L. (2020). *Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Aceh Barat Daya [Skripsi]*. Banda Aceh: Universitas Uin Ar-Raniry.
- Pemerintah Kota Malang. (2022). *Sejarah Kota Malang*. Diambil kembali dari Pemerintah Kota Malang: <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/#1645761344519-f1d8b93b-78e1> (Diakses Pada 21 Desember 2023)
- Peta Tematik Indonesia. (2015). *Administrasi Kota Malang*. Diambil kembali dari <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/03/07/administrasi-kota-malang/> (diakses pada 10 November 2023)
- PKH Kab.Malang*. (2013, Mei 1). Diambil kembali dari PKH Kab.Malang: http://pkh.malangkab.go.id/?page_id=38
- Purhantara, W. (2010). *Metode penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahma, S. (2021, Juni 02). *Jumlah Orang Miskin Kota Malang Bertambah*. Diambil kembali dari Radar Malang: https://radarmalang-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/radarmalang.jawapos.com/malang-roya/kota-malang/02/07/2021/jumlah-orang-miskin-kota-malang-bertambah/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIICAw%3D%3D#aoh=16413043317648&referrer=https%3A%2
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.
- Razali, M. T., & Putri, M. D. (2018). Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018. *Jurnal Kemunting Vol. 1 No. 1*.
- Rondinelli, A. D. (1990). *proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu : Pendekatan Adaptif Terhadap pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Said, M. M. (2019). *Skenario Pendanaan Penanganan kemiskinan terintegrasi Jawa Timur : Makalah pengembangan dari Menteri Musrenbang 2019-2024*. Malang.
- Sa'id, M. M., Hayat, & Maulana, F. (2021). Pengaruh Kinerja Organisasi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada RT 02 RW 04 Dusun Krajan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu). *Jurnal responn Publik Vo;*, 15 No. 4 , 22-29.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Simatupang, P. (2006). Kebijakan dan Strategi Pemantaoan Ketahanan Pangan Wilayah. *Makalah Pembahasan Pada Seminar Nasional "Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian Sebagai Penggerak Ketahanan Pangan Nasional kerjasama Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian"*. Mataram: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB dan Universitas Mataram, Mataram 5-6 September.
- Soestrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetomo. (2006). *Strategi - Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jawa Barat: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: APP AMP YKPN.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 2, 1*, 161 - 166.
- TNP2K. (2015). *Upaya Memutuskan Kemiskinan Antar Generasi* . Jakarta: Tim Nasional percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- TNP2K. (2017). *Panduan Umum, Program Kelyarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*. jakarta: Kementrian Sosial RI.

- Todaro, M. P. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga Jilid 1 & 2* . Jakarta: Erlangga.
- Triono, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo [Skripsi]*. Probolinggo: Repository Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Tyler, W. R. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: Basic Principles of Curriculum and Instruction.
- Wiersma, W. (1986). *Research Methods In Education : An Intoduction*. Massachuestts: Allyn and Bacon, Inc.
- William.Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Yustina. (2021). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu [Skripsi]*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

